

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis atau yang pada masa orde baru disebut dengan Trilogi Pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas dari pada Trilogi pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan.

Negara kita merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas, hal tersebut mencerminkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi di antar wilayah Indonesia. Seperti adanya ketimpangan antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, atau antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah bagian Indonesia memiliki pendapatan yang tinggi, namun disisi lain ada wilayah yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Potensi diantara tiap daerah berbeda-beda satu sama lain, sehingga akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah yang pada akhirnya penggunaan sumber daya yang tidak efisien, seperti kualitas sumber daya yang menurun dan melebarnya sektor tenaga kerja informal. Menurut Kamaluddin (2007), pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatism. Sementara

itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal, walaupun telah dimulai hampir sepuluh tahun yang lalu ternyata hasilnya belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Peningkatan PNB riil yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Dan meningkatnya pendapatan per kapita riil atau pendapatan per kapita atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu, merupakan salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu negara. Namun meningkatnya pendapatan per kapita itu, yaitu pendapatan rata-rata per penduduk, belumlah mencerminkan terdistribusinya secara merata pendapatan nasional dalam masyarakat yang bersangkutan. Mungkin ada kelompok kecil masyarakat yang memperoleh keuntungan besaar dari hasil pembangunan. Namun kelompok masyarakat lainnya tidak atau hampir merasakan peningkatan kesejahteraannya, sehingga mereka tetap saja hidup dalam kemelaratan. Akibatnya perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok kaya dengan kelompok miskin dalam proses pembangunan bisa tidak membaik bahkan bisa menjadi semakin buruk.

Sedangkan menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembagunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas, dimana PDRB provinsi kedua tersebut hampir dua kali

lebih tinggi dari pada PDRB provinsi Maluku dan NTT. Perbedaan tingkat PDRB per kapita tersebut menunjukkan adanya disparitas antar provinsi. Disparitas juga dapat ditandai dengan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, terutama di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan, dan wilayah tertinggal. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, dan teknologi pendukung di wilayah yang tertinggal tersebut. Seperti ketimpangan antara daerah kaya dan daerah miskin. Karena adanya potensi daerah kaya yang meningkat seperti tenaga kerja yang semakin produktif, perdagangan yang semakin lancar, dan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya untuk daerah yang miskin, sumber daya alam yang kurang dikelola dengan baik, selain itu masalah kualitas tenaga kerja yang rendah akibat dari pendidikan yang kurang berkualitas, investasi yang belum ada, dan masalah keterbatasan dalam sarana dan prasarana. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan. Padahal jika kita mempunyai sumber daya alam yang dapat digali, berarti kita mempunyai keunggulan komparatif karena wilayah akan memfokuskan diri untuk memproduksi komoditas tersebut. Selain itu akan dapat mempermudah masuknya investasi ke daerah, dimana dengan adanya investasi tersebut maka akan terjadi arus perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Sejak diterapkannya otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana kedua undang-undang ini mengalami perbaikan ketika tahun 2004, dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk menyusun program pembangunan sendiri, dan pemerintah pusat menransfer sejumlah dana kepada daerah yang digunakan sebagai penerimaan daerah dalam anggaran yang disusun daerah. Dana yang diserahkan kepada daerah, pada umumnya merupakan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus. Selain dana perimbangan di beberapa daerah ada tambahan dana transfer lain, seperti dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola dana yang dimilikinya, harapannya pembangunan akan semakin gencar dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia bisa maju dan merata. Tidak lagi ada kesenjangan, hanya semata-mata karena daerah-daerah tertentu diperhatikan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah lainnya tidak.

Pembangunan di suatu daerah tidak bisa lepas dari pembangunan nasional, dimana diharapkan terjadi pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan ekonomi agar tercapai pemerataan pembangunan. Seperti halnya Provinsi Kalimantan Selatan dimana mempunyai tujuan untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah seperti dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional, dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dapat kita lihat dari PDRB Kalimantan Selatan berdasarkan lapangan usaha seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

**PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Lapangan Usaha Periode Tahun 2004-2007**

Lapangan Usaha	PDRB Prov Kal-Sel (Jutaan Rupiah)				Pertumbuhan PDRB Kal-Sel (Persen)			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Pertanian	5366944	5640957	5905870	6243735	6.01	5.11	4.70	5.72
Pertambangan & Penggalian	4656065	5032633	5408571	5681678	2.29	8.09	7.47	5.05
Industri Pengolahan	3020752	2960952	2910562	2996207	1.39	-1.98	-1.70	2.94
Listrik, Gas, & Air Bersih	117688	121573	126228	131452	5.10	3.30	3.83	4.14
Bangunan	1157012	1252618	1340602	1433164	6.95	8.26	7.02	6.90
Perdagangan, Hotel, & Rest	3321725	3477082	3670305	3896957	4.09	4.68	5.56	6.18
Pengangkutan&Komunikasi	1805864	1943523	2061216	2230869	7.21	7.62	6.06	8.23

Keu,Perswaan&Jasa Pershn	755469	860679	893247	1030451	10.05	13.93	3.78	15.36
Jasa-jasa	1872732	1997972	2135662	2277772	6.43	6.69	6.89	6.65

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat, bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 sebesar 6,01% dimana menunjukkan adanya peningkatan kinerja sektor ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semua sektor mengalami rata-rata tumbuh positif di atas 5 persen pada tahun 2007. Kecuali sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,94 persen dan sektor listrik, gas, dan air bersih yang tumbuh sebesar 4,14 persen. Pertumbuhan sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 15,36 persen. Ini dikarenakan nilai tambah perbankan dipengaruhi oleh kondisi dari sektor moneter dan dari kebijakan pemerintah yang berkaitan perbankan serta perkembangan dunia usaha pada umumnya. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah, walaupun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Karena sudah membaiknya subsektor industri setelah pemerintah melakukan operasi penebangan liar. Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,72 persen atau lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,70 persen. Pertumbuhan ini karena subsektor tanaman bahan makanan yang meningkat cukup tinggi akibat adanya panen raya dan perluasan lahan. Sektor pertambangan yang pengaruhnya cukup besar terhadap PDRB ternyata mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,05 persen. Sektor-sektor yang lain seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya tiga belas (13) jumlah kab/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dan banyak kekayaan akan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, pendapatan, serta perkembangan yang berbeda antar tiap daerah. Dimana tiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, sehingga kekayaan yang dimiliki tiap daerah pun berbeda-beda. Dalam artian tidak terjadi

pemerataan pembangunan, dimana menyebabkan tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Maka dari itu penulis ingin melihat seberapa besar kesenjangan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan tersebut. Sehingga dapat mengetahui pula kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kesenjangan pendapatan antar Kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2004-2007?
2. Bagaimanakah hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat kesenjangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

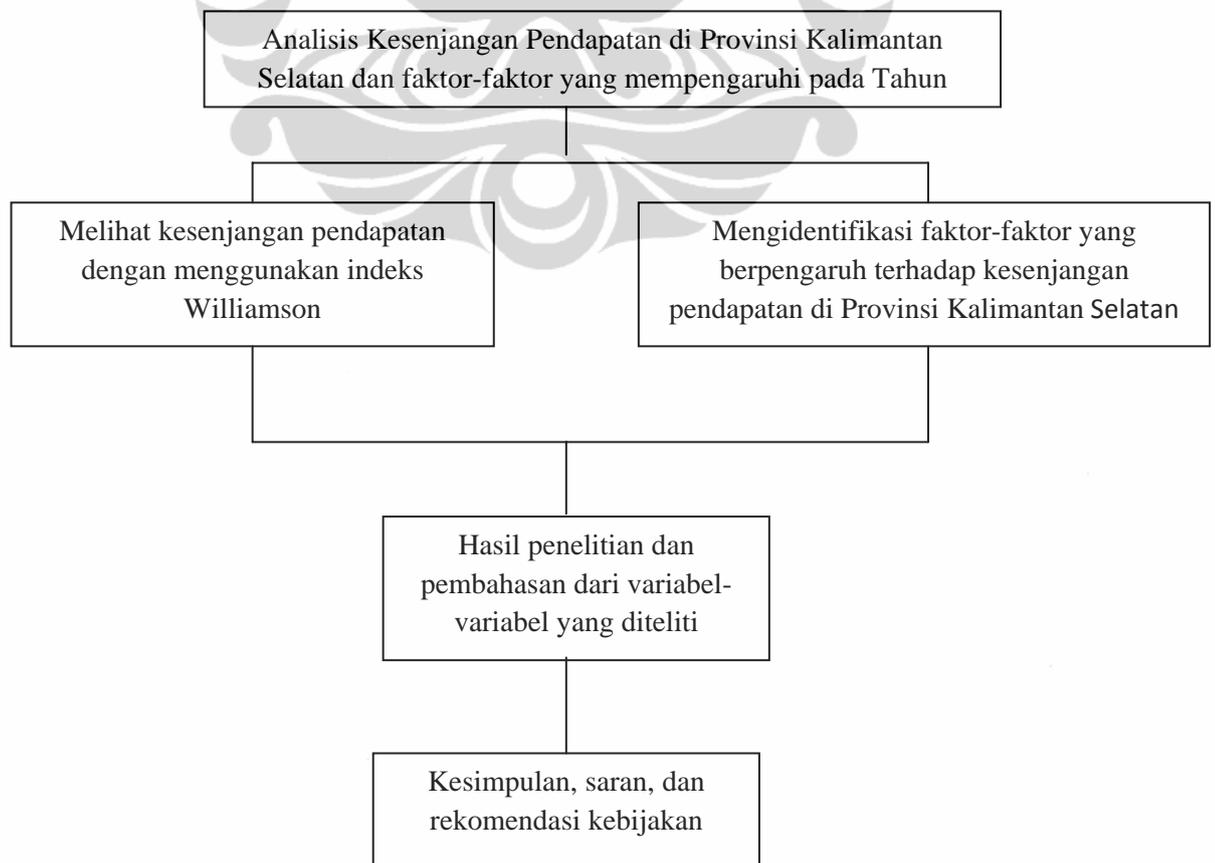
1. Menganalisis kesenjangan pendapatan antar Kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2004-2007.
2. Menganalisis hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat kesenjangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menganalisis kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar daerah dan pengaruhnya terhadap Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2004-2007. Dengan adanya perbedaan sumberdaya antar daerah, tidak mengherankan bila pembangunan pun berbeda di setiap daerah. Akan tetapi bila daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan bagi daerah yang memiliki sumber daya terbatas, maka kesenjangan antar daerah dapat diturunkan.

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, mulai dari persiapan sampai kepada penulisan laporan penelitian sehingga hasil yang didapat dari penelitian dengan menggunakan data yang ada. Memang betul-betul dapat mempresentasi kondisi perekonomian yang ada terutama berkaitan dengan kesenjangan pendapatan antar daerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kerangka Pemikiran



1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat membantu dalam menentukan kebijakan pembangunan di masa datang.

1.6 HIPOTESA PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai hipotesis bahwa tingkat kesenjangan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, panjang jalan, dan pendapatan perkapita. Dimana ketika jumlah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, panjang jalan, dan pendapatan perkapita mengalami peningkatan maka tingkat kesenjangan pendapatan akan menurun.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas serta untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut agar lebih sistematis dan terinci, maka tesis yang diusulkan ini disusun dalam bab-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Hipotesa Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas/Kesenjangan antar Wilayah, Indeks Williamson, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Penelitian Sebelumnya, dan Kerangka Pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang berisikan kerangka konseptual, spesifikasi model, hipotesa yang akan diuji, ruang lingkup penelitian, serta metode analisa data.

Bab IV: Gambaran Umum dan Pembahasan.

Pada bab ini diuraikan tentang keadaan umum perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten-kabupatennya. Kemudian akan dibahas tentang penentuan model dan analisa pembahasannya.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian penutup dari tulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran untuk perbaikan penelitian dan pengembangan daerah selanjutnya.